RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA - SKPD)
TAHUN 2016

BIRO KEUANGAN - SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Pada era otonomi daerah, prevalensi birokrasi yangkompeten dan profesionalbukan sekadar kebutuhan, tetapi merupakan keharusan.Birokrasi yang kompetendan profesional adalah birokrasi yang memiliki ***sense of responsibility*** dan ***professionally*** dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan baik darisegi perencanaan, penganggaran maupun pertanggungjawaban yang berbasis pada prinsip akuntabilitas dan transparansi, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan Sasaran Nasional untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Awal Tahun 2014.

Di era otonomi daerah, sumber daya keuangan tidak lagi diartikan sebagai "***oto money***" melainkan "***delegation of authority and responsibility***". Karena itu pertimbangan utama untuk memberikan otonomi yang lebih besar bukannya terletak pada "kemampuan keuangan daerah" akan tetapi kemampuan melaksanakan "kewenangan dan tanggung jawab" serta mengambil keputusan sendiri dibidang keuangan. Dengan demikian, daerah dikatakan lebih otonom bukan dilihat dari besar kecilnya keuangan yang dimiliki oleh daerah (Pendapatan Asli Daerah Sendiri) melainkan dilihat dari seberapa besar suatu daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab"membuat dan mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Isu Strategis pada Pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Melibatkan Komunitas, Untuk melaksanakan kewenangan dibidang keuangan daerah, Biro Keuangan mengambil dan melaksanakan kebijakan strategis diantaranya :

a. Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah yaitu Kebijakan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada azas efisiensi, efektivitas,transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas.
b. Kebijakan identifikasi dan validasi objek pendapatan. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menetapkan target perolehan pendapatan
c. Kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini dilakukan dengan cara intesifikasi danekstensifikasi objek(sumber) pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

d. Pengelolaan aset daerah.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas dan terlaksananya good governance, maka Pemerintah melalui setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan di Jawa Barat lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparasi keuangan terhadap publik khususnya pada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2016 dengan mengacu kepada Perencanaan Startegis Tahun 2013 -2018, dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan pagu anggaran.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Biro, dana Indikatif beserta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan untuk tahun 2017.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Program dan kegiatan-kegiatan prioritas, maupun kegiatan non-prioritas, tupoksi selama setahun yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Di samping itu, hendaknya Rencana Kerja yang diusulkan betul-betul merupakan penjabaran dari Renstra Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang dapat mendukung visi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Yaitu : "***Menjadikan Biro Keuangan Sebagai Pusat Pengendalian dan Pengelolaan Keuangan Yang Memiliki Integritas, Transparan serta Akuntabel Tahun 2018***" dengan dilandasi oleh perencanaan berbasis kinerja sehingga evaluasi kegiatan dapat berjalan secara tepat, efektif, dan efisien, sertra diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi pemerintah maupun swasta dan stakeholder yang membutuhkannya.

Bandung, 2016
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat

Dra. Hj. NURDIALIS M, M.Si
NIP. 195910077 198503 2 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul .....

Kata Pengantar .....

Daftar Isi .....

BAB I : PENDAHULUAN .....

1.1. Latar Belakang .....

1.2. Landasan Hukum .....

1.3. Maksud Dan Tujuan .....

1.4. Sistematika Penulisan .....

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO KEUANGAN TAHUN 2015 .....

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Keuangan Tahun 2015 dan Capaian Renstra Biro Keuangan 2013 – 2018 .....

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Keuangan .....

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Fungsi Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat .....

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Keuangan Tahun 2016 .....

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2016 .....

BAB IV : PENUTUP .....

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 3 ayat (2) an (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT)

Rencana Pembangunan Tahunan untuk provinsi dan kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, Rencana Kerja (Renja) Biro Keuangan Setda Jabar Tahun 2016.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) ;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) ;
c, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

1.1.1. Visi dan Misi Jangka Menengah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, petmasalahan, tantangan dan peluang yang ada diJawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerint:ahan Daerah ProvinsiJawa Bamt tahun 2013 - 2018 adalah :

"***Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua***"

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang,· diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Misi Jawa Barat 2013-2018

Visi : "Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi Pertama, Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; 2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata; 3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK 4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga
Misi Kedua, Membangun	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan	1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur

Visi : "Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Perkonomian yang Kokoh dan Berkeadilan	mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian 3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan 5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional
Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.	1. Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatkankualitaspelayanan publik serta pembangunan partisipatif. 2. Terwujudnyapemerintahanyang modern. 3. Terwujudnyaprofesionalisme pemerintahan yang didukungolehaparatur yang kompeten. 4. Meningkatkan stabilitas di daerah.	1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik. 2. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK. 3. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur. 4. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum.
Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.	1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan. 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar.	1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana. 2. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat 3. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis
Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.	1. Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 2. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga; 3. Melestarikan seni dan	1. Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 2. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu. 3. Meningkatnya peran

Visi : "Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
	budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing; 4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia.	masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata. 4. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama.

1.1.2. Kondisi Umum Daerah

Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 3.709.528,44 Ha dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara Geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 104°48" - 108°48" Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan dengan batas wilayahnya meliputi:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 Kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis,Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Pangandaran serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Kondisi demografis Jawa Barat secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data 2015, jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 46.709.569 jiwa. Sementara laju pertumbuhannya mengalami penurunan dari 1,52 persen pada 2014 menjadi 1,47 persen pada 2015. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Jawa Barat pada 2015 antara laki laki dengan perempuan adalah 50,72 % : 49,28 % (Tabel 2.5).

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2015

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
Demografi				
1. Jumlah Penduduk	Jiwa	45.340.800	46.029.699	46.709.569
a. Laki-laki	Jiwa	23.004.300	23.345.033	23.690.167
b. Perempuan	Jiwa	22.336.500	2.684.636	23.019.402
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,77	1,52	1,47
3. Kepadatan Penduduk	jiwa per km^2	1.222	1.236	1.259

Sumber : BPS ProvinsiJawa Barat.

1.1.3. Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta catatan penting di atas, maka dirumuskan 16 (enam belas) isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang dikelompokan berdasarkan rujukan aspek kinerja daerah, dengan perincian sebagai berikut:

a. Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi:
   1) ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan;
   2) kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
   3) konflik sosial (SARA); dan
   4) ketahanan keluarga.

b. Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi:
   1) aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
   2) aksesibilitas dan kualitas kesehatan;
   3) kualitas, kuantitas, dan cakupan pelayanan dasar serta infrastruktur strategis di perdesaan dan perkotaan; dan
   4) pelaksanaan reformasi birokrasi.

c. Isu strategis pada aspek daya saing daerah, meliputi:
   1) aksesibiltas, kualitas, dan daya saing ketenagakerjaan;
   2) peran dan daya saing industri kecil dan menengah;
   3) pengelolaan destinasi wisata;
   4) kesadaran politik dan penegakan hukum;

5) peran pemuda dalam pembangunan;
6) prestasi pemuda dalam bidang olahraga;
7) kualitas lingkungan hidup; dan
8) penyelenggaraan penataan ruang.

1.1.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan Tahun 2016 diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan, dimana prioritas pembangunan sektoral (*Common Goals)* membutuhkan sinergitas lintas bidang dan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan.

Ciri utama dari sinergitas tersebut sebagai berikut :

1. Tingginya komitmen kebersamaan lintas OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
2. Perencanaan program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama seluruh OPD yang terlibat berdasarkan prinsip *SMART PLANNING* dan bersifat akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
3. Program dan kegiatan terpilih dilaksanakan berdasarkan prinsip *SHEWHART CYCLE* (*Plan, Do, Check, Action*)
4. Pelibatan secara aktif lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah pusat serta segenap pelaku pembanguan lain termasuk masyarakat sebagai mitra strategis sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat didalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor119);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
27. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2015, dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014/16

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS).

1.4. Sistematika Penulisan

Pokok Bahasan Renja Biro Keuangan Tahun 2016 menjabarkan rencana program dan kegiatan yang disusun secara sinergi dan berkesinambungan dengan alokasi pendanaan indikatif kegiatan untuk anggaran 2016. Renja juga memuat kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam bentuk program yang berisi rangkaian kegiatan dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Renja Biro Keuangan disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO KEUANGAN TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Keuangan Tahun 2015 dan Capaian Renstra Biro Keuangan 2013-2018
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Keuangan
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Keuangan Tahun 2016
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2016

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO KEUANGAN TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Keuangan Tahun Anggaran 2015 dan Capaian Renstra Biro Keuangan 2013 - 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

- **Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi**

  Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.4
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi
Pada Biro Keuangan Setda Jabar Tahun 2015

No.	Sasaran	Capaian (%)	Kategori
1	Terwujudnya aparat pengelola keuangan daerah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan	100	B
2	Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif serta tertatanya kelembagaan keuangan provinsi Jawa Barat	97,50	B
3	Meningkatnya kecepatan, akurasi pelayanan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	91,25	B
4	Tersususunnya sistem pengendalian dan informasi keuangan daerah	100	B

- **Evaluasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2015**

  Perencanaan kinerja Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 merupakan proses penetapan kinerja kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Biro

Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikannya pada tahun anggaran berjalan.

Pencapaian tujuan dengan target sasaran tersebut, pada tahun 2015 Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Barat , menetapkan kebijakan yang tertuang dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2015 yang meliputi:

1. Kebijakan Peningkatan Kualitas (Etos Kerja, Wawasan dan Profesionalisme) Aparat Pengelola Keuangan Daerah
2. Kebijakan Peningkatan Kualitas Penganggaran,, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
3. Kebijakan Peningkatan kualitas peran dan fungsi kelembagaan pengelola keuangan daerah
4. Percepatan pelayanan administrasi Biro Keuangan untuk SKPD Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos dan Bagi Hasil
5. Pengembangan sistem pengendalian dan informasi keuangan daerah

Berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 berikut anggaran yang tersedia untuk Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat tahun 2015 disusun Rencana Kinerja Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 yang mencakup sasaran berikut indikator kinerjanya, program dan kegiatan yang dilaksanakan berikut indikator kinerja serta targetnya.

Sasaran dalam Rencana Kerja yang disajikan bersama indikator kinerja dan targetnya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Renja merupakan jabaran yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes) berikut rencana tingkat capaiannya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Uraian Rencana Kinerja Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dapat disajikan pada Tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2.
Uraian Rencana Kinerja Biro Keuangan Tahun 2015

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya aparat pengelola keuangan daerah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan	1	Tingkat pemenuhan administrasi perkantoran	100%
		2	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan	100%
		3	Prosentase aparatur biro keuangan yang berbasis pendidikan keuangan/akuntansi	80%
		4	Prosentase keberhasilan fasilitasi keuangan daerah	100%
		5	Jumlah pengelola keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat yang tertata dengan baik	27 Buah
2	Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif serta tertatanya kelembagaan keuangan provinsi Jawa Barat	1	Prosentase implementasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)	100%
		2	Tingkat validasi data keuangan dan aset Sekretariat Daerah	100%
		3	Tingkat kecocokan rekonsiliasi keuangan	100%
3	Meningkatnya kecepatan, akurasi pelayanan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	1	Tingkat realitas PPA (PPA : PPAP)	100%
		2	Tingkat implementasi anggaran berbasis kinerja	100%
		3	Prosentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu	100%
		4	Tingkat realitas APBD (APBD : APBDP)	100%
		5	**Jumlah evaluasi atas Raperda Kab/Kota :**	
			- APBD dan perubahannya	26 Kab/Kota
			- Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD dan perubahannya	26 Dokumen
			- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	26 Buah
		6	**Jumlah Raperda yang disusun :**	
			- Raperda APBD Provinsi Jawa Barat	1 Dokumen
			- Raperda pertanggungjawaban APBD Provinsi	1 Dokumen
		7	Jumlah OPD yang direkonsiliasi	57 OPD
			Prosentase laporan keuangan SKPD yang tepat waktu	100%
		8	Prosentase pemenuhan jadwal perubahan APBD	100%
		9	Prosentase akurasi informasi laporan keuangan :	
			- SKPD	100%
			- Provinsi	100%
			- Setda	100%
		11	Tingkat pemenuhan opini WTP atas	100%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
			laporan keuangan Provinsi Jawa Barat	
4	Tersusunnya sistem pengendalian dan informasi keuangan daerah	1	Prosentase penerapan sistem pengendalian dan informasi keuangan daerah	100%
			- LAKIP Biro Keuangan	1 Dokumen
			- Tapkin Biro keuangan	1 Dokumen
			- Laporan keuangan Biro Keuangan	1 Dokumen
			- Laporan keuangan Provinsi	1 Dokumen
			- Laporan keuangan Setda	Dokumen

Untuk program dan kegiatan pada Biro Keuangan dapat dilihat pada tabel II.3. dibawah.

Tabel II.3
Program dan Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2015

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**7.040.227.500**	**6.802.877.500**
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Biro Keuangan	3.496.352.500	3.638.852.500
		Dukungan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.543.875.000	3.164.025.000
2	**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**877.500.000**	**735.000.000**
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Biro Keuangan	877.500.000	735.000.000
3	**Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah**		**7.605.715.500**	**6.754.930.500**
		Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat	549.097.500	549.097.500
		Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016	123.250.000	123.250.000
		Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung	154.725.000	154.725.000
		Dukungan Bantuan Keuangan Kabupaten Kota se Jawa Barat	195.000.000	195.000.000
		Sosialisasi Pergub Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada OPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota se Jawa Barat	167.200.000	167.200.000
		Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota se Jawa Barat Tentang APBD/Perubahn APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota se Jawa Barat Tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD	243.750.000	318.750.000
		Penyelarasan Data-data APBD/Perubahan APBD se Jawa Barat	87.750.000	87.750.000
		Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antar Pemerintah Daerah di Jawa Barat	53.625.000	107.250.000
		Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman Mengenai Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Kabupaten/Kota se Jawa Barat	117.000.000	117.000.000
		Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	150.000.000	-
		Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan	350.000.000	-
		Monitoring Efektivitas Pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pasca dialihkan menjadi Pajak Kab./Kota	195.000.000	-
		Melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	516.750.000	516.750.000
		Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi Penatausahaan Bantuan Keuangan Kab/Kota, Bagi Hasil, Subsidi, Hibah dan Bansos	800.000.000	800.000.000
		Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	800.000.000	800.000.000
		Penyusunan Laporan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan	390.000.000	390.000.000
		Konsultasi dan Koordinasi Dana Transfer	100.000.000	100.000.000
		Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	800.000.000	800.000.000
		Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014	350.000.000	350.000.000
		Penatausahaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah	157.950.000	127.750.000
		Tindak Lanjut Hasil Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah	487.500.000	389.000.000
		Bimbingan Teknis Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	416.650.000	328.220.000
		Dukungan Badan Layanan Umum Daerah	120.000.000	102.970.000
		Dukungan Informasi Keuangan Daerah	202.468.000	152.218.000
		Rakor Fasilitasi Penyelesaian Retur Dana SP2D	78.000.000	78.000.000
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**48.750.000**	**48.750.000**
		Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Keuangan	48.750.000	48.750.000
5	**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**		**2.923.497.600**	**2.923.497.600**
		Penyusunan Perubahan Anggaran Fixed Cost Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 dan Perencanaan Fixed Cost Belanja Pegawai Tahun 2016	104.418.600	104.418.600

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
		Pemutakhiran Data dan Fasilitasi Pengelolaan Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat	945.034.000	945.034.000
		Penyusunan Laporan DAU, Tabungan Perumahan, IWP dan PPh Pasal 21	232.340.000	232.340.000
		Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah	838.500.000	838.500.000
		Sinkronisasi dan Konfirmasi Pendapatan Daerah	803.205.000	803.205.000

2.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Stratejik.

1. Terwujudnya aparat pengelola keuangan daerah yang professional untuk meningkatkan pelayanan dengan capaian kinerja 100%. Pencapaian sasaran stratejik tersebut diatas didukung oleh pencapaian indikator :

   a Tingkat pemenuhan adminsitrasi perkantoran 100%. Keberhasilan tersebut didukung oleh keberhasilan program pelayanan adminstrasi perkantoran dengan kegiatan penyelengaraan administrasi perkantoran Biro Keuangan dan dukungan pelayanan pengelolaan keuangan daerah yang tercapai 100%.

   b Tingkat pemenuhan sarana prasarana pelayanan dengan capaian 100%. Keberhasilan tersebut didukung oleh program pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pemenuhan sarana prasarana Biro Keuangan yang dapat dilaksanakan seluruhnya 100%, sehingga pelayanan dapat berjalan sesuai dengan Tupoksi Biro keuangan.

   c Prosentase aparatur Biro Keuangan yang berbasis pendidikan Keuangan/Akuntansi dengan capaian 80%. Merupakan upaya untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi keuangan kepada SKPD/OPD yang sampai dengan tahun 2012 telah diupayakan menempatkan aparatur Biro Keuangan yang berbasis pendidikan, keuangan/akuntansi, walaupun target dalam renstra 100%, tetapi beberapa pegawai tata usaha belum sepenuhnya berbasis pendidikan keuangan/akuntansi.

   d Persentase keberhasilan fasilitasi keuangan dengan capaian 100%. didukung oleh program pemantapan otonomi daerah dengan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan di Jawa Barat yang tercapai dilaksanakan 100% sesuai tupoksi Biro Keuangan.

2. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif serta tertatanya kelembagaan keuangan Provinsi Jawa Barat dengan capaian kinerja rata-rata 97,50%. Pencapaian sasaran stratejik tersebut diatas didukung oleh pencapaian indikator :

   a Jumlah pengelola keuangan daerah di Jawa Barat yang tertata dengan baik sebanyak 27 buah yaitu Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat dan DPKAD/Dinas keuangan/bagian keuangan di 26 Kabupaten/Kota seluruhnya ditata dengan baik.

   b Persentase implementasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dengan capaian kinerja 100%, yaitu target 100% dan realisasi 100%. Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh program pengembangan komunikasi informasi media massa dan pemanfaatan teknologi informasi dengan kegiatan dukungan help desk dan pelatihan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengembangan aplikasi SIPKD dan penyusunan perencanaan fixed cost belanja pegawai tahun anggaran 2012 dan perubahan anggaran fixed cost belanja pegawai tahun 2012 yang telah berhasil dilaksanakan 100%, namun demikian outcome/hasil yang diharapkan belum dapat dicapai sepenuhnya karena beberapa kendala SDM (brain ware), Hardware maupun Software sehingga kinerja outcome baru tercapai kira-kira 80%.

   c Tingkat validasi data keuangan dan asset Sekretariat Daerah dengan capaian kinerja 100% keberhasilan kinerja tersebut diatas didukung oleh program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah dengan kegiatan lanjtutan validasi data keuangan fisik asset milik Sekretariat Daerah dengan capaian kinerja 100%.

   d Tingkat kecocokan rekonsiliasi keuangan dengan capaian kinerja 100% keberhasilan kinerja ini didukung oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 57

unit kerja. Target tahun 2012 ditetapkan 100%, namun pada saat pencocokan belum sepenuhnya sesuai 100% dan secara berangsur rekonsiliasi terus dilaksanakan sampai dengan tingkat kecocokan mendekati 100%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi, sinkronisasi, dan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah diselesaikan seluruhnya (57 unit kerja) dengan outcome sebesar 90%.

3. Sasaran stratejik meningkatnya kecepatan, akurasi pelayanan dan pertanggungjawaban keuangan tercapai 91,25%.

   Pencapaian kinerja tersebut diatas didukung oleh program pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan kegiatan :

   - Penyempurnaan standar analisa belanja daerah Provinsi Jawa Barat
   - Fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah
   - Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah
   - Fasilitasi dan konsultasi tata kelola keuangan daerah aspek penatausahaan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012.
   - Pembinaan dan bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah.
   - Kegiatan penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan evaluasi Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten dan Kota.
   - Penyusunan dan pelaksanaan APBD TA 2015 dan 2016.
   - Penyusunan laporan penyerapan anggaran bulanan, triwulan, semester dan tahunan berdasarkan SP2D.
   - Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi penatausahaan bantuan keuangan Kabupaten/Kota, bagi hasil, subsidi, hibah dan Bansos.
   - Penyusunan penatausahaan bendahara daerah.
   - Kegiatan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota se Jawa Barat tentang APBD, perubahan APBD TA. 2015 dan rancangan peraturan Bupati/Walikota se Jawa Barat tentang penjabaran APBD / penjabaran perubahan APBD TA.2015.
   - Kegiatan rekonsiliasi dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
   - Kegiatan penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

4. Hasil-hasil yang diperoleh dan menunjang keberhasilan sasaran stratejik antara lain tingkat realitas PPA yaitu PPA dibanding PPAS 90%. Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu 94.82 %. Tingkat anggaran berbasis kinerja 100%. Tingkat realitas APBD yaitu APBD dibanding APBDP 98 %. Kendala yang timbul dalam proses menghasilkan kinerja tersebut adalah adanya kondisi-kondisi yang memunglkinkan perubahan APBD, volume SP2D yang cukup tinggi dan belum adanya standar ABK yang dibakukan yang menyeluruh dari setiap jenis kegiatan dan faktor kelemahan Sumber Daya Manusia.

   Selanjutnya telah berhasil dievaluasi Raperda Kabupaten/Kota tentang APBD dan perubahannnya, Peraturan Bupati / Walikota tentang penjabaran APBD dan perubahannya serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 27 Kab/Kota (100%).

   Reperda yang berhasil disusun dengan kinerja 100% adalah Raperda APBD dan Raperda pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Barat.

   Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang direkonsiliasi sebanyak 57 Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat dengan hasil 98% yang kemudian terus dilakukan pencocokan hingga mendekati angka 100%

   Laporan SKPD yang tepat waktu, pemenuhan jadwal perubahan APBD masing-masing mencapai 90% karena kendala waktu sehubungan dengan volume pelaporan kinerja yang beragam.

   Persentase akurasi laporan keuangan SKPD, Provinsi maupun Setda 97 % yang kemudian direkonsiliasi mendekati angka 100%.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan, BPK menilai bahwa Neraca Pemprov Jabar per 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dalam semua hal yang material, telah disajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memenuhi kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"BPK menilai Pemprov Jabar telah melaksanakan perbaikan-perbaikan, sesuai rekomendasi BPK pada LHP BPK Tahun 2014, yang berpengaruh signifikan pada tingkat kewajaran penyajian LK Pemerintah Provinsi Jabar TA 2011. Perbaikan tersebut di antaranya adalah melakukan inventarisasi dan penelusuran piutang pajak dan retribusi, melakukan *stock opname* atas seluruh persediaan yang dimiliki, menyajikan aset tetap dengan nilai wajar, menelusuri aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, memastikan keberadaan aset yang dicatat, serta memastikan semua aset yang ada telah tercatat.

5. Sasaran stratejik tersusunnya sistem pengendalian dan informasi keuangan tercapai 100%. Keberhasilan tersebut didukung oleh keberhasilan penyusunan LAKIP, Tapkin, Laporan Keuangan pada Biro Keuangan, Laporan untuk Tahun Anggaran 2012 sebanyak 1 dokumen dengan angka penyelesaian 100 %, Laporan Keuangan Provinsi dan Setda seluruhnya selesai 100%. Program yang mendukung adalah peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal Biro Keuangan.

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat

- **Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, kedudukan Biro Keuangan Sekretariat Daerah sebagai unsur auxiliary staff yang memberikan dukungan pelayanan internal *(Internal service)* kepada Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Unit Pelaksana Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat *(external service).* Dalam kedudukannya sebagai unsur auxiliary staff, Biro Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta

evaluasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.

Secara spesifik dan Administratif pengelolaan keuangan daerah, Biro Keuangan mempunyai Tugas Pokok dalam mengkoordinasikan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan dalam rangka proses Pelaksanaan Administrasi APBD, yang terdiri dari :

a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Penatausahaan
d. Pertanggungjawaban

- **Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Keuangan mempunyai fungsi, diantaranya:

1. Mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan APBD.
2. Mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan APBD, meliputi kegiatan penatausahaan sampai dengan pengendalian Administrasi pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Mengkoordinasikan perhitungan APBD dalam rangka laporan pertangfgungjawaban Gubernur dan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keuangan Daerah.
4. Melaksanakan pengedalian/pengawasan preventif pelaksanaan APBD.
5. Menyelenggarakan pembinaan kepada aparat pengelolaan Keuangan Daerah secara teknis fungsional dalam pengurusan Keuangan secara khusus.

- **Kewenangan**

Kewenangan Kewenangan Biro Keuangan meliputi:

a. menyelenggarakan perumusan dan program kerja Biro Keuangan;
b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta
c. fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;

d. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi anggaran;
e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perbendaharaan; menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan;
f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Kas Daerah;
g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
h. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah;
i. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan APBD;
j. menyelenggarakan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah, dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
m. menyelenggarakan ketatausahaan Biro;
n. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKP J, dan LPPD Biro;
o. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Keuangan;
p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

- **Struktur Organisasi Biro Keuangan**

Struktur organisasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Susunan organisasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala, 4 (empat) Kepala Bagian yang masing-masing membawahi

Kepala Sub Bagian dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Biro Keuangan
2. Kepala Bagian Anggaran
   a. Kepala Sub Bagian Anggaran I
   b. Kepala Sub Bagian Anggaran II
   c. Kepala Sub Bagian Pendapatan
3. Kepala Bagian Perbendaharaan
   a. Kepala Sub Perbendaharaan I
   b. Kepala Sub Perbendaharaan II
   c. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Non Program
   d. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kas Daerah
4. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
   a. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan I
   b. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan I
   c. Kepala Sub Informasi Keuangan Daerah
5. Kepala Bagian Evaluasi dan Pembinaan
   a. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pembinaan I
   b. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pembinaan II

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan, serta (iii) Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Jawa Barat Tahun 2016, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2015, prioritas nasional dalam rancangan awal RKP Tahun 2016, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 khususnya sembilan prioritas pembangunan (NAWA-CITA), kondisi lingkungan eksternal (kondisi global), yang tertuang dalam bab sebelumnya. Disamping itu prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2016 memperhatikan tiga dimensi pembangunan manusia: (1) dimensi sumber daya manusia; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Keuangan Tahun 2016

Program / Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2016

Perencanaan kinerja Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat pada

tahun 2016 merupakan proses penetapan kinerja kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikannya pada tahun anggaran berjalan.

Pencapaian tujuan dengan target sasaran tersebut, pada tahun 2016 Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Barat , menetapkan kebijakan yang tertuang dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2016 yang meliputi:

6. Kebijakan Peningkatan Kualitas (Etos Kerja, Wawasan dan Profesionalisme) Aparat Pengelola Keuangan Daerah
7. Kebijakan Peningkatan Kualitas Penganggaran,, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
8. Kebijakan Peningkatan kualitas peran dan fungsi kelembagaan pengelola keuangan daerah
9. Percepatan pelayanan administrasi Biro Keuangan untuk SKPD Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos dan Bagi Hasil
10. Pengembangan sistem pengendalian dan informasi keuangan daerah

Berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 berikut anggaran yang tersedia untuk Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat tahun 2016 disusun Rencana Kinerja Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang mencakup sasaran berikut indikator kinerjanya, program dan kegiatan yang dilaksanakan berikut indikator kinerja serta targetnya.

Sasaran dalam Rencana Kerja yang disajikan bersama indikator kinerja dan targetnya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Renja merupakan jabaran yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes)

berikut rencana tingkat capaiannya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

3.3. Program / Kegiatan sesuai APBD Tahun Anggaran 2016

Atas dasar kebijakan tersebut, program yang dilaksanakan pada tahun 2016 meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Biro Keuangan, Dukungan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Biro Keuangan.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Peningkatan Alat Sarana dan Prasarana Biro Keuangan
4. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan kegiatannya : Penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat, Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rapat Koordinasi Nasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat, Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD/Perubahan APBD/Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD/Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Barat, Sinergitas dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Antar Pemerintah Daerah di Jawa Barat, Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah, Konsultasi dan Koordinasi Penatausahaan Non Program, Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Konsultasi dan Koordinasi Dana Transfer, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, Penatausahaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah, Bimbingan Teknis Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah, Konfirmasi, Fasilitasi Penyaluran dan Penyelesaian Retur Dana SP2D.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Internal Biro Keuangan

6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatnnya : Pemutakhiran Data dan Fasilitasi Pengelolaan Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sinkronisasi dan Konfirmasi Pendapatan Daerah, Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah.

Untuk program dan kegiatan pada Biro Keuangan dapat dilihat pada tabel II.3. dibawah.

Tabel II.3

Program dan Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2016

NO	URAIAN	JUMLAH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**6,006,780,000.00**
1	*Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Biro Keuangan*	3,175,000,000.00
2	*Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah*	2,831,780,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**2,223,090,000.00**
3	*Kegiatan Peningkatan Alat Sarana dan Prasarana Biro Keuangan*	2,223,090,000.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	**288,000,000.00**
4	*Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Biro Keuangan*	288,000,000.00
	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	**7,174,098,000.00**
5	*Penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat*	968,100,000.00
6	*Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*	483,860,000.00
7	*Rapat Koordinasi Nasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat*	321,930,000.00
8	*Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD/Perubahan APBD/Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD/Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Barat*	700,000,000.00
9	*Sinergitas dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Antar Pemerintah Daerah di Jawa Barat*	397,000,000.00
10	*Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah*	579,350,000.00

NO	URAIAN	JUMLAH
11	*Konsultasi dan Koordinasi Penatausahaan Non Program*	915,618,000.00
12	*Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah*	932,240,000.00
13	*Konsultasi dan Koordinasi Dana Transfer*	70,000,000.00
14	*Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*	800,000,000.00
15	*Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015*	350,000,000.00
16	*Penatausahaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah*	40,000,000.00
17	*Bimbingan Teknis Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah*	500,000,000.00
18	*Konfirmasi, Fasilitasi Penyaluran dan Penyelesaian Retur Dana SP2D*	116,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**45,400,000.00**
19	*Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Keuangan*	45,400,000.00
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	**2,218,070,000.00**
20	*Pemutakhiran Data dan Fasilitasi Pengelolaan Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat*	983,910,000.00
21	*Sinkronisasi dan Konfirmasi Pendapatan Daerah*	498,160,000.00
22	*Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah*	736,000,000.00
	JUMLAH TOTAL	**17,955,438,000.00**

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kinerja Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat ini merupakan bentuk Rencana yang akan dilaksanakan serta dipertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat selama Tahun Anggaran 2013-2018.

Rencana Kerja ini merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016. RKPD tahun 2016 merupakan Upaya memantapkan Pembangunan Secara Menyuluruh melalui Tahap Pengembangan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, tingkat keberhasil dari Rencana Kerja tahun 2013 ini akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan Kinerja Gubernur berserta perangkat daerahnya pada tahun 2016 mendatang.

Rencana Kinerja Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dijadikan pedoman dalam Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sangat tergantung dari komitmen, kesepakatan, kesepahaman Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana.

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat

Dra. Hj. NURDIALIS M, M.Si
NIP. 195910077 198503 2 005